

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan multidimensional. Dari perspektif orang tua dan wali murid, kebijakan ini membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, tetapi dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Bagi sebagian orang tua, penerapan jalur zonasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan adanya sistem ini, siswa tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan waktu istirahat serta belajar di rumah. Namun, bagi orang tua yang memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pendidikan anaknya, jalur zonasi sering kali menjadi hambatan. Tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama, sehingga mereka merasa anak-anak mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah unggulan.

Penerapan jalur zonasi ini juga mendorong orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk menerima kebijakan tersebut dengan lebih terbuka. Mereka merasa bahwa anak-anak mereka memiliki peluang yang lebih adil untuk bersekolah di sekolah negeri tanpa harus bersaing dengan siswa yang memiliki nilai akademik lebih tinggi. Sebaliknya, orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke atas cenderung mencari cara alternatif untuk memastikan anak mereka tetap mendapatkan pendidikan di sekolah unggulan. Beberapa di antaranya melakukan relokasi tempat tinggal atau menggunakan jalur lain seperti jalur prestasi dan afirmasi.

Selain itu, jalur zonasi ini juga memunculkan praktik manipulasi alamat yang dilakukan oleh sebagian orang tua demi mendapatkan akses ke sekolah

favorit. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan kualitas sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan.

Dari sudut pandang wali murid yang kurang memahami kebijakan ini, jalur zonasi masih dianggap sebagai sistem yang kurang transparan. Sosialisasi yang kurang optimal dari pemerintah membuat beberapa orang tua merasa kebingungan dalam proses pendaftaran dan pemilihan sekolah.

Penerapan jalur zonasi ini juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Beberapa siswa merasa tidak tertantang karena tidak bersekolah di lingkungan yang kompetitif, sementara yang lain justru mendapatkan kesempatan untuk berkembang di sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, keberagaman siswa dalam satu sekolah akibat sistem zonasi diharapkan dapat memperkaya pengalaman sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di beberapa kasus, justru menimbulkan ketimpangan dalam tingkat akademik dan persiapan belajar.

Orang tua dan wali murid juga melihat bahwa jalur zonasi ini menuntut peran lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung pendidikan anak mereka. Tidak lagi sekadar memilih sekolah terbaik, tetapi juga memastikan anak tetap berprestasi di sekolah mana pun mereka diterima.

Pemerintah diharapkan untuk terus mengevaluasi kebijakan zonasi agar tidak hanya menjadi sistem pemerataan akses, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan. Tanpa upaya peningkatan mutu di semua sekolah, jalur zonasi berisiko menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan. Orang tua yang tidak puas dengan penerapan jalur zonasi ini sering kali mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sekolah. Fasilitas yang tidak merata di berbagai sekolah menjadi salah satu faktor ketidakpuasan utama.

Wali murid juga menyuarakan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua sekolah, sehingga setiap siswa, tanpa memandang zonasi, tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Program pelatihan guru yang lebih merata menjadi solusi yang diharapkan dari kebijakan ini.

Meskipun terdapat banyak tantangan, penerapan jalur zonasi ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi beban sekolah favorit yang sebelumnya selalu mengalami lonjakan jumlah pendaftar. Sekolah non-favorit kini memiliki kesempatan untuk berkembang dengan menerima lebih banyak siswa. Selain itu, orang tua yang memahami manfaat jangka panjang dari sistem zonasi lebih menerima kebijakan ini dengan baik. Mereka menyadari bahwa dengan pemerataan pendidikan, kesenjangan sosial dapat dikurangi dalam jangka panjang.

Keterlibatan orang tua dalam meningkatkan kualitas sekolah di lingkungan mereka menjadi salah satu efek positif dari penerapan jalur zonasi ini. Banyak komunitas orang tua yang mulai aktif dalam mendukung sekolah lokal untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran.

Namun, tantangan utama tetap terletak pada bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa setiap sekolah memiliki standar pendidikan yang sama. Tanpa pemerataan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas, jalur zonasi hanya akan menjadi kebijakan yang merugikan bagi sebagian orang tua dan wali murid.

Bagi sebagian orang tua yang merasa bahwa jalur zonasi ini kurang fleksibel, pemerintah diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan yang tetap memberikan kesempatan bagi siswa berbakat untuk mengembangkan potensinya tanpa harus dibatasi oleh lokasi tempat tinggal.

Secara keseluruhan, penerapan jalur zonasi ini masih memerlukan berbagai penyesuaian agar benar-benar dapat menciptakan pemerataan pendidikan. Orang tua dan wali murid memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini dengan tetap aktif mengawasi dan membantu anak-anak mereka dalam proses pendidikan.

Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa jalur zonasi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Dengan demikian, sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata dapat tercapai.

5.2 Saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan jalur zonasi. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan zonasi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis di setiap daerah. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, baik dalam aspek tenaga pengajar, kurikulum, maupun fasilitas pendukung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Sosialisasi mengenai kebijakan zonasi harus lebih masif dan terstruktur agar orang tua, wali murid, dan masyarakat memahami tujuan serta mekanisme kebijakan ini. Dengan informasi yang lebih jelas, resistensi terhadap sistem zonasi dapat diminimalisir.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi guru yang bertugas di sekolah non-favorit agar mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Program peningkatan kesejahteraan guru juga harus diperhatikan demi meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Selain itu, infrastruktur sekolah harus ditingkatkan secara merata, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sistem zonasi harus tetap memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk memilih sekolah yang sesuai dengan potensi akademik maupun non-akademik mereka. Pemerintah dapat menyediakan jalur khusus bagi siswa berprestasi tanpa mengesampingkan prinsip pemerataan.

Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam implementasi zonasi untuk menghindari praktik manipulasi alamat yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Transparansi dalam seleksi penerimaan peserta didik baru harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan zonasi di wilayahnya. Koordinasi yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan ini berjalan dengan efektif. Partisipasi

masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan harus didorong melalui program-program kolaboratif antara sekolah dan komunitas lokal. Orang tua dan warga sekitar dapat berperan dalam mendukung kegiatan sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem zonasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses seleksi siswa. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi digital yang menyediakan informasi terkait sekolah berdasarkan zonasi dan mekanisme pendaftaran yang lebih transparan. Kebijakan zonasi harus lebih fleksibel dalam penerapannya, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jumlah sekolah. Penyesuaian aturan dalam situasi tertentu dapat membantu mengakomodasi kebutuhan siswa dan orang tua. Sekolah perlu menyediakan program bimbingan bagi siswa yang terdampak sistem zonasi agar mereka dapat beradaptasi dengan baik. Program ini bisa berupa bimbingan akademik, konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa.

Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sekolah dalam meningkatkan kualitasnya. Dana tersebut harus dialokasikan secara merata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh daerah. Peningkatan keamanan dan kenyamanan sekolah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sekolah yang aman dan kondusif akan memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa serta menekan angka putus sekolah. Sistem zonasi harus terus dikaji agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Kebijakan ini harus mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial serta tantangan di dunia pendidikan yang terus berkembang.

Diperlukan kebijakan afirmatif bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Program beasiswa dan bantuan pendidikan dapat menjadi solusi bagi siswa yang kesulitan dalam mengakses sekolah yang layak. Pemerintah harus lebih responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat terkait sistem zonasi. Dengan adanya forum komunikasi antara orang tua, sekolah, dan pihak berwenang, setiap permasalahan yang muncul dapat segera diatasi. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemerataan pendidikan harus terus ditingkatkan melalui kampanye edukatif. Jika masyarakat memahami bahwa sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam akses pendidikan, maka dukungan terhadap kebijakan ini akan semakin

kuat. Selain itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Pendidikan yang inklusif tidak hanya berfokus pada pemerataan akses, tetapi juga pada keadilan pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penyediaan fasilitas pendukung bagi anak berkebutuhan khusus di setiap sekolah menjadi langkah yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan nasional.

Dalam jangka panjang, kebijakan zonasi juga harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan keterampilan siswa agar mereka siap menghadapi dunia kerja. Pemerintah dapat mendorong sekolah untuk memperkuat pendidikan vokasi dan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini dapat membantu menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki keterampilan yang aplikatif. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus diperkuat dalam mengawal implementasi sistem zonasi. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang berdampak langsung pada anak-anak mereka. Dengan keterlibatan semua pihak, kebijakan zonasi dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi semua peserta didik di Indonesia.



